



FEB

Lembaga
Demografi

PANTAU DATA

PDKT

KUPAS TUNTAS

Perempuan

dan Lingkar Kekerasan dalam Keluarga





Foto: Chuttersnap/Unsplash

KDRT sebagai Ancaman Pembangunan Keluarga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurunkan kualitas pembangunan keluarga karena perempuan yang berperan memikul mayoritas kerja domestik, menjadi pengasuh utama, dan mengelola kesejahteraan emosional keluarga menjadi korban paling parah ketika mereka terpapar kekerasan. Hal ini menyebabkan fungsi-fungsi dasar keluarga terganggu hingga memengaruhi generasi berikutnya.



Secara ekonomi, KDRT menciptakan “*economic trap*” bagi perempuan. Kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan membuat perempuan semakin bergantung secara finansial pada pelaku, sehingga siklus kekerasan semakin sulit diputus. Selain itu, biaya kesehatan *out-of-pocket*, hilangnya jam kerja, serta beban proses hukum menambah tekanan pada kondisi keuangan rumah tangga.



Foto: Canva

Beban Ganda & Dampak pada Pengasuhan

Beban ganda muncul karena korban harus menanggung trauma fisik-psikologis sekaligus melanjutkan tugas domestik dan peran pengasuhan. Hal ini menurunkan kualitas pengasuhan bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena kapasitas emosional dan fisik yang tereduksi. Dampak psikologis seperti depresi, kecemasan, hilangnya rasa harga diri, mengganggu komunikasi orang tua-anak, menghasilkan pola asuh reaktif dan meningkatkan risiko trauma sekunder pada anak. Efek lintas generasi ini tidak hanya menghasilkan luka emosional, tetapi juga memengaruhi kualitas SDM di masa depan.

Foto: Karthik Pillai/Unsplash

Perempuan, Penstabil Emosi Keluarga

Perempuan berperan sebagai penstabil sosial-emosional keluarga. Sayangnya, KDRT dapat memecah dinamika ini, meningkatkan konflik antaranggota keluarga, dan menurunkan resiliensi keluarga secara makro. Selain itu, KDRT menghambat mobilitas sosial perempuan dalam pendidikan, partisipasi ekonomi, dan akses bantuan. Dengan demikian, kondisi seperti ini berpotensi memperparah kemiskinan lintas generasi.

Kasus Kekerasan yang Tidak Tersampaikan dalam Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2022-2024 yang diolah LD FEB UI menunjukkan prevalensi perempuan yang pernah mengalami penganiayaan atau kekerasan seksual tercatat hanya **0,01–0,02%**

Namun, perlu diingat

Angka yang rendah

≠

**Kekerasan
jarang terjadi**

**Tidak semua pengalaman kekerasan
dapat tersampaikan
dalam survei populasi besar.**

Temuan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024

Kolaborasi Kemen PPPA, BPS, UNFPA, LD FEB UI, dan LPEM FEB UI



1 dari 4 perempuan Indonesia
usia 15–64 tahun
pernah mengalami kekerasan.

Meskipun prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual menurun sejak 2016 dan 2021, kekerasan emosional dan psikologis tetap menjadi bentuk yang paling **sering terjadi dan paling jarang dilaporkan.**





Angka pelaporan di perkotaan lebih tinggi (**25,23%**) dibandingkan pedesaan (**22,45%**), menunjukkan perbedaan akses, dukungan, dan penerimaan sosial terhadap isu kekerasan.



Perbedaan angka antara Susenas dan SPHPN berkaitan dengan perbedaan tujuan dan kedalaman pendekatan. SPHPN menerapkan pendekatan khusus yang memungkinkan perempuan berbagi pengalamannya dalam lingkungan wawancara yang lebih aman dan suportif.

Hambatan Pelaporan dan Normalisasi Kekerasan

Studi kualitatif SPHPN 2024 turut mengungkap kenyataan yang lebih kompleks. banyak bentuk kekerasan masih dianggap wajar, terutama kekerasan verbal, kontrol emosional, dan pembatasan mobilitas.

Kasus baru dianggap “serius” jika sudah mengancam nyawa. Norma gender yang timpang dan tafsir budaya-agama yang keliru ikut menahan perempuan untuk keluar dari lingkaran kekerasan.

SPHPN juga menyoroti hal-hal yang menjadi hambatan pelaporan:

Pelaporan sering berhenti di tokoh masyarakat yang belum berperspektif gender

Penekanan pelaporan kasus yang berakhir dengan jalur mediasi secara kekeluargaan

Kualitas layanan UPTD PPA belum merata

Norma sosial menekan perempuan untuk diam demi menjaga “aib keluarga”

Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa KDRT bukan hanya persoalan individu,

KDRT adalah isu struktural.

KDRT memengaruhi ketahanan keluarga, kualitas pengasuhan, hingga masa depan generasi Indonesia.

Ketika perempuan tidak memiliki ruang aman untuk hidup, bekerja, dan mengasuh, seluruh ekosistem keluarga kehilangan fondasi utamanya.



FEB

Lembaga
Demografi

Foto: Vonecia Carswell/Unsplash

Perlindungan Perempuan sebagai Fondasi Ketahanan Keluarga

Melindungi perempuan berarti menjaga kesinambungan fungsi sosial dan ekonomi keluarga, mulai dari kesehatan mental ibu, perkembangan anak, hingga mobilitas sosial di tingkat rumah tangga. Upaya pencegahan, pelaporan, dan pemulihan harus berjalan bersamaan, diperkuat oleh layanan publik yang responsif, norma sosial yang mendukung, serta kebijakan yang berfokus pada pencegahan kekerasan dan pemulihan korban.



“Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyisakan luka. Lebih luas lagi, KDRT dapat memperlambat kemajuan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi anggota keluarga terutama perempuan dan anak.

Maka, menghapus kekerasan terhadap perempuan adalah langkah mendesak untuk memastikan keluarga Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, setara, dan kondusif bagi tumbuh kembang anggota keluarga, sehingga generasi berikutnya dapat berkembang tanpa mewarisi siklus kerentanan yang sama.”